

**TINJAUAN YURIDIS PRAKTIK MONOPOLI OLEH BUMN DI SEKTOR
PENGAMANAN TERKAIT KEPASTIAN HUKUM PASAL 51 UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
(Dalam Kasus PT Sucofindo (Persero))**

INTISARI

Oleh

Aloen Sagara Badaruzaman¹ dan Veri Antoni, S.H., M.H.²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan PT Sucofindo melakukan praktik monopoli dalam usaha penyediaan jasa terkait pengamanan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah, dan mengetahui dan mengkaji implikasi hukum dari Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait praktik monopoli oleh PT Sucofindo (Persero) di sektor pengamanan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah.

Penelitian ini bersifat normatif dengan data sekunder sebagai sumber data. Data diteliti dengan cara studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, faktor-faktor yang menyebabkan PT Sucofindo (Persero) melakukan praktik monopoli dalam usaha penyediaan jasa terkait pengamanan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah, adalah dikarenakan faktor hukum, dan faktor budaya hukum. Kedua implikasi hukum dari Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait praktik monopoli oleh PT Sucofindo (Persero) adalah tidak adanya kepastian hukum dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena ketika pemerintah hanya menunjuk PT Sucofindo (Persero) sebagai satu-satunya badan yang ditunjuk, tanpa melihat atau memperhatikan pihak swasta yang memiliki kompetensi yang relatif sama, berakibat timbulnya indikasi melakukan praktik kesewenang-wenangan dalam usaha penyediaan jasa terkait pengamanan tersebut.

Kata Kunci: Monopoli, BUMN, PT Sucofindo (Persero).

¹Mahasiswa Magister Hukum Universitas Gadjah Mada.

²Dosen Pembimbing Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada.

**REVIEW OF JURIDICAL MONOPOLY PRACTICES BY SECTOR OF
SECURITY ASSOCIATED SOE CERTAINTY IN LEGAL ARTICLE 51
OF LAW NUMBER 5 YEAR 1999 ON THE PROHIBITION OF
MONOPOLY PRACTICES AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION
(In Case of PT Sucofindo (Persero))**

ABSTRACT

By

Aloen Sagara Badaruzaman³ dan Veri Antoni, S.H., M.H.⁴

This study aims to identify and assess the factors that cause PT Sucofindo conduct monopolistic practices in the business of providing services related to security organizations, companies and / or agencies / government agencies, and identify and study the legal implications of Article 51 of Law No. 5 of 1999 on Prohibition of monopolistic practices and Unfair Competition related practices monopoly by PT Sucofindo (Persero) in the security sector organization, company and / or institution / agency.

This study is normative and secondary data as a data source. Data examined by means of document study. Data were analyzed qualitatively. The results of the analysis presented descriptively.

The results show, first, the factors that cause PT Sucofindo (Persero) to monopolistic practices in the business of providing security related services organizations, companies and / or agencies / government, is due to legal factors, and cultural factors of law. Both the legal implications of Article 51 of Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition related to monopolistic practices by PT Sucofindo (Persero) is the absence of legal certainty in Article 51 of Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition because when the government just appointed PT Sucofindo (Persero) as the sole designated body, without seeing or watching a private party who has the competence relatively equal, result in the emergence indications practice of arbitrariness in the business of providing services related to security mentioned.

Keyword: Monopoly, BUMN, PT Sucofindo (Persero).

³Post Graduate Students Law Faculty University of Gadjah Mada

⁴Lecturer in Law Faculty University of Gadjah Mada